

TESIS

**REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

***REFORMULATION OF DIGITAL FORENSIC REGULATIONS IN THE
EVIDENTIARY PROCESS OF CORRUPTION CRIME CASES AT THE
ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA***



Oleh:

SACVIO FATH SENAJAYA

NIM. 2310622067

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

TESIS

**REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

***REFORMULATION OF DIGITAL FORENSIC REGULATIONS
IN THE EVIDENTIARY PROCESS OF CORRUPTION CRIME
CASES AT THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA***



Oleh:

SACVIO FATH SENAJAYA

NIM. 2310622067

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

HALAMAN JUDUL

**REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI
DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Program Magister

**Disusun dan diajukan oleh:
SACVIO FATH SENAJAYA
NIM. 2310622067**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:
SACVIO FATH SENAJAYA
NIM. 2310622067

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS
Pada Tanggal.....

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS.
NIP. 199304282022031009

Pembimbing 2



Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 198601272024061001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904
Laman : hukum.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM
PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:
SACVIO FATH SENAJAYA
NIM. 2310622067

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 7 Januari 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui:

Pembimbing 1

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H.,
M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS.
NIP. 199304282022031009

Dean Fakultas Hukum



Dr. Sunerman, S.H., LL.M.
NIP. 197006022021211004

Pembimbing 2

Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 198601272024061001

Koordinator Program Studi
Magister Hukum

Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H.,
M.H.
NIP. 198910192025211048

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Sacvio Fath Senajaya
NIM : 2310622067
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul **“REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Jakarta,

Yang Membuat Pernyataan,



Sacvio Fath Senajaya
NIM. 2310622067

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sacvio Fath Senajaya
NIM : 2310622067
Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, _____
Yang Membuat Pernyataan,



Sacvio Fath Senajaya
NIM. 2310622067

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil‘aalamiin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada program studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis tak lepas dari pihak-pihak yang telah membantu dari awal hingga tesis dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Rektor.
2. Bapak Dr. Suherman S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta beserta para Wakil Dekan.
3. Bapak Dr. Muhammad Helmi Fahrozi, S.H.I., S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang telah banyak mengarahkan penulis dalam hal kajian Ilmu Hukum maupun dalam mengarahkan penulis dalam proses administrasi pengajuan usulan Penelitian.
4. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr.Adm.Kes., DipFS. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan, tambahan ilmu, serta masukan dan pengarahan dalam penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, juga tambahan referensi serta ilmunya dan dengan penuh sabar dan penuh perhatian dalam penulisan Tesis ini.

6. Bapak Irwan Hariyanto, S.ST., M.S.F., selaku Ahli Digital Forensik Kejaksaan Agung yang telah memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan tesis ini;
7. Orang tua penulis (Bapak & Ibu), istri (Windy T.A), dan keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan semangat dan rasa syukur;
8. Para dosen yang memberikan ilmu dan pengalamannya selama perkuliahan di program studi Magister Ilmu Hukum di UPN Veteran Jakarta;
9. Rekan – rekan mahasiswa dan alumni yang berperan aktif maupun pasif membantu dan berkontribusi dalam proses perkuliahan penulis sampai tahap akhir dan memperoleh kelulusan;
10. Para kolega di tempat penulis bekerja yang telah memberikan doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit untuk dapat menyelesaikan karya akhir ini. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya kritik dan saran demi perbaikan karya yang akan datang.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana, serta menjadi kontribusi kecil bagi dunia akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia.

Jakarta, 10 Januari 2026

Penulis

Sacvio Fath Senajaya

ABSTRAK

REFORMULASI PERATURAN DIGITAL FORENSIC DI DALAM PROSES PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Sacvio Fath Senajaya (2310622067), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri
Wahyudi

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan modus operandi tindak pidana korupsi, yang semakin banyak melibatkan penggunaan sistem elektronik dan data digital. Kondisi ini menjadikan alat bukti digital sebagai elemen penting dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan digital forensik yang jelas, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, khususnya di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Namun demikian, pengaturan hukum yang berlaku saat ini masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga belum memberikan pedoman teknis yang komprehensif mengenai penanganan alat bukti digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi reformulasi peraturan digital forensik dalam proses pembuktian perkara tindak pidana korupsi serta mengkaji peran pengaturan internal Kejaksaan dalam menjamin kepastian hukum dan kualitas pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pengaturan khusus mengenai digital forensik berpotensi menimbulkan ketidakseragaman praktik penanganan alat bukti digital, melemahkan nilai pembuktian di persidangan, serta berisiko melanggar prinsip *due process of law*. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan tentang Digital Forensik di lingkungan Kejaksaan RI sebagai bentuk reformulasi kebijakan hukum untuk memperkuat standar pembuktian dan efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi di era digital.

Kata Kunci: Digital Forensik; Pembuktian; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan Agung; Reformulasi Hukum.

ABSTRACT

REFORMULATION OF DIGITAL FORENSIC REGULATIONS IN THE EVIDENTIARY PROCESS OF CORRUPTION CRIME CASES AT THE ATTORNEY GENERAL'S OFFICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Sacvio Fath Senajaya (2310622067), Handar Subhandi Bakhtiar, Slamet Tri Wahyudi

The development of information technology has brought significant changes to the patterns and modus operandi of corruption crimes, which increasingly involve the use of electronic systems and digital data. This condition has made digital evidence a crucial element in the evidentiary process of corruption crime cases. Therefore, clear, systematic, and adaptive digital forensic regulations are required, particularly within the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. However, the existing legal framework remains general and fragmented across various laws and regulations, and thus has not provided comprehensive technical guidelines for the handling of digital evidence. This study aims to analyze the urgency of reformulating digital forensic regulations in the evidentiary process of corruption crime cases and to examine the role of internal prosecutorial regulations in ensuring legal certainty and the quality of evidence. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the absence of specific regulations on digital forensics may lead to inconsistent practices in handling digital evidence, weaken its evidentiary value in court, and pose risks to the principle of due process of law. Accordingly, this study recommends the establishment of a Prosecutorial Regulation on Digital Forensics as a form of legal policy reform to strengthen evidentiary standards and enhance the effectiveness of corruption law enforcement in the digital era.

Keywords: *Digital Forensics; Evidence; Corruption Crime; Attorney General's Office; Legal Reform.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL TESIS.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teoritis.....	14
1. Teori Pembuktian Hukum Pidana	15
2. Teori Legalitas.....	18

3. Teori Forensik Digital (<i>Digital Forensic Theory</i>).....	22
B. Kajian Konseptual	26
1. Tindak Pidana Korupsi.....	26
2. Alat Butki Digital.....	27
3. Peran Kejaksaan Agung RI	28
C. Kerangka Pikir	30
D. Definisi Operasional.....	31
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	33
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	35
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	36
D. Analisis Bahan Hukum.....	37
BAB IV	39
HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Bukti Digital dalam Proses Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	39
1. Problematika Pembuktian dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	39
2. Urgensi Pemberlakuan Bukti Digital Forensik	42
3. Kedudukan dan Kekuatan Pembuktian Digital Forensik dalam Sistem Hukum Pidana	47
4. Praktik Penanganan Perkara Korupsi dengan Digital Forensik ..	53
B. Reformulasi Peraturan Mengenai Digital Forensic yang Ideal untuk Mendukung Efektivitas Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.....	58

1. Kelemahan dan Tantangan Regulasi Digital Forensic yang Berlaku Saat Ini di Kejaksaan Agung	58
2. Standar Internasional Dalam Penerapan dan Pedoman Penanganan Alat Bukti Digital	63
3. Model Ideal Regulasi Digital Forensic bagi Kejaksaan Agung (Studi Komparatif dengan Negara Lain)	69
4. Strategi Implementasi dan Harmonisasi Antar Aparat Penegak Hukum	76
BAB V	83
PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	87

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Orisinalitas Penelitian	9
Tabel 2 Pemetaan Standar ISO terhadap Rumusan Ideal Peraturan Kejaksaan tentang Digital Forensik.....	66
Tabel 3 Perbedaan ISO dengan Undang – Undang.....	69
Tabel 4 Perbandingan Regulasi Digital Forensic di Beberapa Negara dan Relevansinya bagi Kejaksaan Agung RI.....	74